

The Real Manifestation of The Implementation of Chapter XIV of the 1945 Constitution Relating to The National Economy and Social Welfare in Order to Carry Out the Objectives of SDG's 2030 through the Mandiri Village Guided by the University

Wujud Nyata Pelaksanaan Bab XIV UUD 1945 yang Berkaitan dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Demi Melaksanakan Tujuan SDG's 2030 melalui Desa Mandiri Binaan Universitas

Khoiril Huda

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Surel: khoirilhudaws@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Universitas ataupun perguruan tinggi yang ada semestinya melaksanakan tri dharma perguruan tinggi itu secara nyata. Desa Mandiri Binaan Universitas (DMBU) memiliki konsep yang sangat sesuai dengan berbagai program Universitas Negeri Semarang yang memiliki jargon konservasi. Tulisan ini menawarkan berbagai langkah solutif agar kegiatan yang berkaitan dengan konservasi, organisasi kemahasiswaan dan kegiatan lainnya di lingkungan kampus dapat sejalan dengan tujuan SDG's 2030. Fokus utama dari DMBU adalah mencapai cita-cita dan wujud konkret amanah Bab XIV UUD 1945. Pasal 33 ayat 3 dan 4, serta pasal 34 ayat 2 dan 3 yang menjadi titik utama.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 10 Februari 2018

Dipublikasi 30 Mei 2018

KATA KUNCI

Keywords

DMBU, Desa Mandiri Binaan Universitas, Perekonomian Nasional, Kesejahteraan UUD 1945

HOW TO CITE (saran perujukan):

Huda, Khoiril. (2018). "Wujud Nyata Pelaksanaan Bab XIV UUD 1945 yang Berkaitan dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Demi Melaksanakan Tujuan SDG's 2030 melalui Desa Mandiri Binaan Universitas", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 1, Mei, hlm. 65-78.

I. PENDAHULUAN

Bumi yang dulunya hijau, cantik, dan elok dilihat hingga membuat berbagai planet seperti mars, venus dan yang lain menjadi iri sekarang sudah berubah menjadi rasa iba kepada bumi. Pembangunan berkelanjutan marak diagendakan,

ini merupakan bentuk kepedulian para penghuni bumi agar hunian mereka tidak semakin ambruk. Aspek-aspek yang difokuskan dalam wacana pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kehidupan yang sangat kompleks tentu harus dijalani dan tiga aspek diatas memang harus dimulai perbaikannya karena masyarakat dunia sudah terlalu banyak berhutang dan lupa membayarnya kepada bumi.

Kali ini pembahasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) akan condong ke bidang sosial karena segala sesuatu dimulai dari individu yang tentunya merupakan makhluk sosial. Kemiskinan akan terus berlangsung jika pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat belum terlaksana dengan bagus. Mendapatkan pekerjaan, pendidikan, standar hidup yang layak, hak mendapatkan makanan dan air bersih, serta perumahan yang layak bisa menjadi dasar agar pembangunan berkelanjutan di bidang sosial terlaksana. Dengan memasukkan indikator keberhasilan pemenuhan hak diatas akan bertemulah 3 aspek pembangunan keberlanjutan.

Aspek lingkungan yang saat ini bermasalah sudah pasti tidak bisa memenuhi hak untuk mendapatkan air bersih yang merupakan hak setiap manusia. Disaat hak sudah diberikan, tentu butuh kesadaran individu untuk melaksanakan kewajiban menghemat air bersih agar tidak semakin menipis jumlah air bersih (air tawar yang murni) di bumi yang notabene hanya berjumlah 3 % dari total jumlah air. Pemerintah, lembaga-lembaga, dan organisasi-organisasi yang ada perlu memberikan pendidikan kesadaran hak-kewajiban, dan masyarakat harus mau dididik hingga seminar, pertemuan, ataupun sejenisnya bukan hanya kegiatan yang sifatnya berhambur.

Kehidupan masyarakat di desa dapat kita jadikan contoh untuk menerapkan tujuan SDG's dengan prinsip kekeluargaan. Konsep desa yang mandiri cocok dengan Azas Demokrasi Indonesia, yakni kekeluargaan (Hidup Bebrayan) untuk mengabdikan kepentingan bersama demi mencapai tujuan hidup yang selaras. Akan tetapi, mulai redup azas ini dikalangan masyarakat. Lalu, lunturnya azas demokrasi ini hubungannya dengan lingkungan kehidupan apa? Tentu saja berhubungan. Kita sering terlena dengan kehidupan materialistik dan mementingkan kepentingan masing-masing individu, kelompok, dan golongan

tertentu. Lingkungan dieksploitasi secara berlebihan, sawah, ladang, dijadikan sebagai hunian. Hutan berubah menjadi pabrik milik swasta, perseorangan ataupun atas nama pemerintah. Kesadaran akan pentingnya lingkungan yang mesti dijaga seolah-olah dikalahkan dengan keinginan untuk berlomba-lomba memperoleh kekayaan yang sifatnya singkat. Uang bisa kita hasilkan dari alam, namun alam tidak bisa dikembalikan dengan uang. Merubah alam dalam sekejap bisa dilakukan demi mendapatkan sejumlah keuntungan. Sedangkan menumbuhkan 1 pohon saja butuh bertahun-tahun demi menyediakan oksigen untuk manusia yang menebangnya.

Kenapa kita sibuk mengikuti tren dunia yang mencanangkan Program SDGs hingga tahun 2030? Melalui pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusufkalla kita mulai paham bahwa mewujudkan SDGs itu butuh proses. Tidak hanya lingkungan alam saja yang kita perhatikan, tetapi manusia yang ada mengelilingi alam itu juga perlu dipenuhi kebutuhannya agar tidak merusak alam. Busung lapar, gizi buruk, pendidikan yang masih tertinggal, kesehatan, dan banyak sekali aspek yang perlu kita perbaiki bersama pemerintah. Masyarakat, perusahaan swasta dan organisasi-organiasi yang ada jangan hanya menunggu pemerintah, apalagi menyalahkan keterlambatan pemerintah. Pemerintah juga butuh kerjasama dengan masyarakat yang seharusnya lebih dahulu memiliki kesadaran individu dan kelompok untuk menjaga kelangsungan hidup.

Pendidikan kesadaran individu dalam melaksanakan dan menjalankan program Sustainable Development Goals perlu dimulai. Sudah cukup kita hanya melaksanakan program penanaman pohon, tapi tidak menjalankannya dengan baik. Uang negara banyak dihabiskan untuk dana penanaman pohon, tapi masyarakat lebih banyak menghabiskan kertas, tisu dan barang lainnya yang menggunakan pohon sebagai bahan utamanya. Memaki satu pihak ataupun menyalahkan pemerintah saat ada bencana tidaklah berfaedah sama sekali. Sekarang adalah saatnya kita memulai pendidikan kesadaran individu akan pentingnya memperbaiki lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan alam tentunya. Kesadaran individu yang sifatnya bisa menebar karena seseorang bisa dipengaruhi oleh lingkungannya.

Universitas ataupun perguruan tinggi yang ada semestinya melaksanakan tri dharma perguruan tinggi itu secara nyata. Desa Mandiri Binaan Universitas (DMBU) memiliki konsep yang sangat sesuai dengan berbagai program Universitas Negeri Semarang yang memiliki jargon konservasi. Lalu apa bedanya DMBU dengan program desa binaan yang sudah ada sebelumnya ? Pada kesempatan kali inilah penulis ingin menawarkan berbagai langkah solutif agar kegiatan yang berkaitan dengan konservasi, organisasi kemahasiswaan dan kegiatan lainnya di lingkungan kampus dapat sejalan dengan tujuan SDG's 2030. Fokus utama dari DMBU adalah mencapai cita-cita dan wujud konkret amanah Bab XIV UUD 1945. Pasal 33 ayat 3 dan 4, serta pasal 34 ayat 2 dan 3 yang menjadi titik utama dalam pembahasan kali ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana langkah-langkah konkrit agar program DMBU (Desa Mandiri Binaan Universitas) berjalan sesuai tujuan SDG's?
2. Bagaimana keberlanjutan program DMBU dan dampak yang muncul setelah penerapannya di Indonesia?

Metode Studi Pustaka

Metode yang di pakai dalam karya tulis ini adalah:

1. Metode Pustaka

Yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan alat, baik berupa buku maupun informasi di internet.

2. Sumber Data.

Sumber Data Sekunder, diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, thesis, dan sebagainya, yang memuat informasi-informasi yang diperlukan dalam penyusunan.

II. TELAAH PUSTAKA

SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju dan negara berkembang. Termasuk Indonesia yang juga turut serta mendukung SDG's 2030 ini. Perlu pengambilan kebijakan yang matang dari pemerintah dan masyarakat yang akan mendukung melalui partisipasinya terhadap program yang akan direncanakan pemerintah. Berbicara tentang kondisi Indonesia yang terdiri dari berbagai desa, wilayah ini memiliki topografi, kondisi dan geografis yang berbeda-beda. Perbedaan ini tentu harus disiasati oleh pemerintah dengan memahami Konsep pembangunan desa yang sudah lama dilaksanakan dan mendapat apresiasi yang tinggi dari pemerintah sejak tahun 2014.

Sesuai amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014, kesejahteraan masyarakat di desa perlu ditingkatkan. Memberdayakan masyarakat sudah semestinya dilakukan agar tercapainya pemenuhan kebutuhan di daerah pedesaan. Pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa, sekitar 47 triliun (ISHARTONO & SANTOSO TRI RAHARJO, 2015: 160). Seringkali suatu program tidak berjalan karena kurangnya pelibatan masyarakat secara langsung atau dengan melihat sisi lain masyarakat terkadang kurang diberdayakan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57). Dengan adanya program DMBU (Desa Mandiri Binaan Universitas) yang penulis tuangkan dalam kesempatan kali ini diharapkan bisa melaksanakan tujuan poin 1,3, dan 6 dari SDG's melalui program memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Bukan hanya masyarakat sasaran, tetapi juga melibatkan masyarakat secara luas.

III. PEMBAHASAN

Melalui Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019, presiden Jokowi menetapkan ada 122 kabupaten tertinggal di Indonesia. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah

tertinggal berdasarkan kriteria: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibilitas; dan f. karakteristik daerah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mencatat, di Indonesia masih terdapat 26 persen desa yang masuk kategori tertinggal. Lebih dari separuhnya berada di kawasan Timur Indonesia. Indikator tertinggal adalah desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, memiliki mayoritas penduduk yang miskin, belum mandiri secara ekonomi pedesaan, lingkungan hidup yang tidak terkelola dengan baik dan masih kurangnya akses terhadap pelayanan dasar (<http://ditjenpdt.kemendesa.go.id>)

Data ini dapat membantu kita menentukan lokasi pelaksanaan program yang penulis usulkan. Seringkali kita merasa berada di zona yang sudah nyaman, sibuk dengan urusan di kota dan melupakan desa yang masih banyak tertinggal. Pemuda yang ada di universitas seolah-olah sibuk dengan kehidupan maya-nya ataupun kehidupan kampus yang tidak bisa ia tinggalkan demi mencapai cita-cita dan keinginan individual. Fenomena yang seringkali muncul adalah mahasiswa sibuk dengan kuliah, organisasi, hubungan asmara ataupun hal lain yang membuatnya terlena dan lupa akan makna mahasiswa-nya. Berdasarkan data dari kemenristekdikti, jumlah mahasiswa di Indonesia per-2015 adalah 5.896.419 Dengan total perguruan tinggi sejumlah 3225(Sumber: <https://www.bps.go.id>).

Permasalahan yang ingin diselesaikan dalam SDG's bisa terlaksana apabila semua elemen di negara ini mau bekerjasama. Mahasiswa dan universitas sebagai motor penggerak diharapkan bisa menyelesaikan dan memberi solusi di permasalahan pengentasan kemiskinan, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak, serta kepastian hidup sehat dan tingkat kesehatan yang lebih baik.

A. Langkah-langkah Konkrit Agar Program DMBU (Desa Mandiri Binaan Universitas) Berjalan Sesuai Tujuan SDG's

Berbagai permasalahan yang diangkat dalam sustainable development goals memiliki indikatornya masing-masing seperti poin 1,3, dan 6 yang berkaitan dengan pelaksanaan amanah UUD 1945 pada bab XIV. Kegiatan kemasyarakatan sudah dilakukan oleh pihak kampus dan organisasi

kemahasiswaan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa yang peduli dengan masyarakat masih minim jumlahnya. Kehidupan kampus mulai dirasuki hawa materialistik individu maupun kelompok. Hal demikian membuat mahasiswa menjadi sibuk dengan urusan pribadi nya saja hingga lupa dengan lingkungannya. Langkah-langkah dibawah ini bisa berjalan sesuai rencana apabila kesadaran individu dan kelompok maupun kelembagaan benar-benar ingin melaksanakannya. Konsep desa binaan dari universitas ini bersifat kekeluargaan, dan bukan komersil.

1. Kegiatan Makrab (Malam Keakraban) yang sering ditemui setiap

pembentukan kepengurusan baru, penyambutan mahasiswa baru dan lainnya

Berkaca pada pengalaman, setiap pergantian kepengurusan organisasi kemahasiswaan di berbagai fakultas, universitas dan kelembagaan melaksanakan kegiatan yang bertajuk malam keakraban. Dalih mengakrabkan diri, muncul pertanyaan apakah benar makrab yang akhir-akhir ini masih dilaksanakan punya tujuan mengakrabkan diri? Rasa kebersamaan itu didasari dari sikap memiliki dan seringnya komunikasi. Bukan semata-mata dengan mengikuti makrab tiba-tiba kita akrab. Memang ada benarnya melalui makrab itu akan muncul rasa saling memiliki dan perasaan menjadi bagian dari suatu lingkungan baru.

Penulis ingin menawarkan makrab yang lebih bermanfaat dengan terjun langsung ke masyarakat. Rata-rata setiap kampus yang kedatangan mahasiswa baru akan mempersiapkan agenda makrab, bagaimana jika makrabnya kita modifikasi dengan menunjuk suatu desa sebagai desa binaan. Jangan khawatir tentang dana, secara jujur saja kita harus mengatakan bahwa setiap kelembagaan mahasiswa biasanya mengumpulkan iuran dari individu-individu yang ikut kegiatan tersebut. Misalkan saja ada 350 mahasiswa baru dalam satu angkatan, lalu mendonasikan Rp. 100.000 uangnya untuk mengikuti program makrab, dapat dipastikan akan ada Rp. 35.000.000,- uang terkumpul. Angka yang sangat luarbiasa jika penerapan konsep gotong royong benar-benar dilakukan.

Bila dana sudah ada, harus ada kepanitiaan yang benar-benar tulus untuk bekerja dan memiliki kapasitas yang mumpuni di bidang pengabdian masyarakat. Jangan sampai dana ini malah tidak tepat penggunaannya. Berdiskusi dengan masyarakat sasaran, apa yang mereka butuhkan untuk kemajuan desa dan apa

saran dari kita yang kira-kira bisa diterapkan. Seperti pembuatan bank sampah, perbaikan sanitasi dan penyaluran air di desa tertinggal sudah bisa menyelesaikan poin ke 6 SDG's. menurut Tentu kita bisa membayangkan betapa banyaknya fakultas dan kelembagaan mahasiswa di Indonesia. Apabila konsep ini diterapkan, sudah berapa desa yang bisa kita bantu? Jawabannya: Masyarakat sudah pasti terbantu.

2. Bank Sampah dan penerapan 3Re (*re-use, re-duce, re-cycle*)

Berkaitan dengan langkah pertama, para mahasiswa tersebut akan mendatangi secara *house to house* untuk mendampingi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Konsep 3Re dapat berjalan jika benar-benar disediakan fasilitas tempat sampah dimasing-masing rumah warga. Sampah sisa makanan, bungkus plastik, dedaunan, dan berbagai sampah yang termasuk barang bekas seharusnya dipisahkan. Setiap sampah harus diapresiasi dari pengelola. Pengelola disini adalah para pemuda yang terlebih dahulu sudah diajarkan tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar melalui bank sampah.

Sistem tabungan sampah bisa diterapkan di kalangan warga pedesaan, sehingga akan terbentuk budaya peduli lingkungan yang sistemik dan terstruktur. Para pemuda di desa bisa diajarkan berkefektifitas dalam mengelola sisa makanan yang bisa dijadikan pakan ternak, sampah an-organik yang bisa didaur ulang, dan pengolahan sampah organik sebagai pupuk pertanian. Pemuda di desa sangat butuh pendampingan dari mahasiswa. Pendampingan secara intensif tidak mustahil dilakukan karena satu kali terjun, jumlah mahasiswa sebanyak 350 orang di satu desa. Setiap rumah juga akan didampingi oleh beberapa mahasiswa sehingga semua elemen dalam program ini turun tangan secara bersama.

3. PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Contoh nyata PAMSIMAS sudah mulai sukses berjalan di masyarakat. Program yang memiliki misi untuk menyalurkan ketersediaan air dan sanitasi ini patut ditiru dan diterapkan dalam program DMBU. Berkaca pada PAMSIMAS di Kabupaten Klaten, tepatnya di Desa Jimbung masyarakat digiatkan melalui semangat gotong royong untuk membuat saluran air yang nantinya ada pipa-pipa

kecil mengalir ke masing-masing rumah warga dengan bantuan sebuah pompa. Ada penampungan air yang terdapat pada sebuah mesin penyaring. Untuk biaya perawatan, masyarakat iuran secara sukarela Rp.8000,- setiap bulannya.

Warga yang paham dengan kesulitan air bersih pasti sangat menghargai keberadaan air. Oleh karena itu, program makrab yang dialihkan ke desa tertinggal (kesusahan air bersih) akan memberikan pengalaman tersendiri bagi mahasiswa yang sering terlena dan dengan gampang membiarkan air terbuang sia-sia di rumah/kosnya yang berada di sekitaran wilayah kota. Sudah saatnya para mahasiswa menyadari nilai-nilai kehidupan dari kegiatan yang sederhana dan menghilangkan sikap hedonismenya.

4. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif

Sumber daya alam di pedesaan sangat melimpah. Akan tetapi, mengapa desa masih banyak yang kurang sejahtera? Berkaca pada kenyataan, banyak masyarakat desa yang masih kurang mendapatkan ilmu dalam memberdayakan sumber daya alam. Kehidupan sehari-hari masih dirasakan aman selama bisa memenuhi kebutuhan primernya. Padahal, hasil alam dari desa perlu pembaharuan dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang ada di wilayahnya. Hasil sumber daya alam sebaiknya jangan dijual mentah-mentah, pemuda yang kreatif dan inovatif seperti mahasiswa dan seluruh civitas akademisi universitas yang bisa meyakinkan masyarakat desa untuk meningkatkan produktifitas pekerjaan mereka.

5. Penanaman Pohon Setiap Mahasiswa Baru

UNNES sebagai kampus konservasi sudah berani memprakarsai penanaman pohon di lingkungan kampus dan beberapa desa lain yang menjadi mitra. Apabila semua perguruan tinggi menerapkan hal yang sama, sudah pasti kekayaan oksigen di Indonesia semakin naik dan membuat dunia menjadi sejuk. Penulis kembali mengusulkan, program penanaman pohon ini perlu diintensifkan agar setiap mahasiswa baru menanam pohon yang harus dia rawat. Jangan hanya sekedar melepas kewajiban sebagai mahasiswa yang baru di terima di kampus konservasi ini, lalu eksis di medsos agar terlihat peduli lingkungan. Bangsa ini tidak

butuh ribuan foto yang diupload di medsos. Ribuan hingga jutaan pohon yang layak hidup dan berkembang adalah kebutuhan sebenarnya. Terbukti bahwa beberapa dekade ini jumlah pohon dan hutan lindung kian menurun. ±684.000 Ha hutan menghilang setiap tahunnya (Kompas, 30/08/2016). Setiap mahasiswa harus melihat perkembangan pohon yang ditanamnya. Ibaratkan merawat seorang anak, maka lakukanlah berbagai cara agar pohon itu tumbuh dan berkembang dengan sempurna.

6. Menyalurkan Ilmu Selama di Perkotaan Demi Kemajuan di Pedesaan

Banyak ilmu yang telah didapatkan dibangku kuliah, namun kurang implementasi dari berbagai mahasiswa. Melihat banyaknya jumlah mahasiswa di Indonesia, tentu mereka memiliki ide-ide yang sangat kreatif dan idealis tentang penyelesaian suatu masalah. Misalkan saja dengan mengambil contoh mahasiswa yang berada di posisi keilmuan hukum, konsep dana desa yang sering bermasalah bisa diberikan *alternative solution* berupa ilmu *good governance*. Pengelolaan pemerintahan yang seringkali melupakan asas legalitas yang bertujuan untuk adanya kepastian hukum dan kegiatan pejabat publik yang kurang sesuai dengan AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) secara menyeluruh membuat negeri ini semakin bingung. Bingung tentang apa dan bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan. Namun, pemerintah tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kebingungan ini.

Terkadang, pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik, akan tetapi sikap tidak acuh dari masyarakat pada umumnya, dan pemuda (mahasiswa) lebih khususnya seringkali hanya melihat kebijakan itu gagal dan tidak peduli dengan kenapa gagalnya program pembangunan. Contoh saja dana desa yang mengalami kesalahpahaman dalam pengelolaannya. ICW (Indonesia Corruption Watch) melalui penelitiannya, Egi Primayogha menyebutkan kepala desa adalah pihak yang paling banyak terlibat korupsi. Selama 2016-2017, ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa. Kasus yang terbukti berjumlah 139 aktor, 107 di antaranya merupakan kepala desa. Di sisi lainnya adalah 30 perangkat desa dan sisanya ialah istri kepala desa. Jumlah kerugian negara mencapai Rp 30 miliar (Sumber: Detik.com).

Dapat kita analisa, tindakan korupsi yang dilakukan pemerintah desa beraneka ragam. Diantaranya: penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang (menyalahi asas spesialisasi), pungutan liar, *mark up* anggaran dan laporan fiktif (tidak rasional), pemotongan anggaran, dan suap. Mahasiswa yang memiliki idealisme tinggi, pengetahuan, dan keinginan memajukan negeri harus terjun ke masyarakat. Melalui program DMBU diharapkan menjadi momen yang tepat karena langsung turun ke lapangan dan membuat wawasan pejabat publik bersama masyarakat desa menjadi lebih baik. Perlu diajarkan cara pemerintahan yang transparan, efisien, efektif, terbuka, rasional, serta tidak ada lagi penyelewengan dana desa yang seharusnya dirasakan oleh warga akan kebermanfaatannya. Beberapa studi juga menegaskan bahwa kesejahteraan (*welfare*) dalam berbagai segi memiliki implementasi yang luas, mulai dari pelibatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, maksimalisasi fungsi pajak, hingga jaminan atas hukum bagi masyarakat (Damayanti, 2016; Arumingtyas, 2014; Ekaningsih, 2012).

B. Keberlanjutan Program DMBU dan Dampak yang Muncul Setelah Penerapannya di Indonesia

Negara yang dalam artian “negara modern” harus melaksanakan kegiatan dalam bernegara yang didukung langsung oleh masyarakat, pihak swasta, dan lembaga pemerintahan. Hal ini didukung oleh Moh.Kusnardi yang berpendapat bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dimana rakyatnya ikut serta memerintah (masuk dalam kegiatan pemerintah), baik secara langsung yang masih sering ditemukan dalam masyarakat sederhana, maupun secara tidak langsung yang terdapat dalam negara-negara modern (Moh.Kusnardi, 1983:19).

Berlanjutnya program DMBU (Desa Mandiri Binaan Universitas) jika semua elemen mendukung. Dukungan semestinya dimulai dari Universitas, Lembaga Kemahasiswaan, Swasta (jika ikut dalam kegiatan ini, seperti CSR, pendanaan, dan lainnya), NGO/ organisasi non pemerintah, serta lembaga pemerintah di desa/ wilayah yang menjadi mitra. Apabila semua pihak ini benar-benar melaksanakan program DMBU, poin-poin dalam program Sustainable Development Goals bisa berjalan sesuai harapan.

Seminim-minimnya, mulai ada perbaikan di bidang kesadaran masyarakat (*legal awareness*), kepedulian lingkungan yang memperbaiki sanitasi dan ketersediaan air bersih, dilanjutkan dengan kepastian hidup sehat karena semua kegiatan tidak bisa lepas dari ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik, dan berkurangnya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan bisa turun, dimulai dengan hal sederhana dan aksi yang benar-benar nyata. Jika pola hidup sudah terbentuk dalam desa binaan, tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah lain menjadi kawasan yang lebih tertata kedepannya. Dengan syarat : keberlanjutan program, masyarakat/ wilayah binaan benar-benar didatangi terus dalam beberapa kurun waktu yang ditetapkan; *good governance*; dukungan dari semua pihak dalam kehidupan bernegara.

IV. PENUTUP

Sudah terlalu lama manusia “berhutang” kepada alam yang saat ini kita lihat dan rasakan kondisi nya. Keserakahan, sikap materialistik, individualisme dalam bertindak, kurangnya kesadaran membuat kita terlena akan keinginan untuk memajukan dan menyejahterakan diri sendiri ataupun kelompok. Mahasiswa dan perguruan tinggi mulai mencari tindakan nyata untuk mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan dari SDG’s. Program DMBU (Desa Mandiri Binaan Universitas) mengalihkan berbagai kegiatan mahasiswa dan universitas yang lebih efektif dan yang dirasa lebih dibutuhkan di masyarakat. Adapun berbagai kegiatan yang dialihkan adalah Makrab (Malam Keakraban), kegiatan penanaman pohon, pembuatan bank sampah, dan pemberdayaan ekonomi kreatif serta berbagai langkah yang telah ditawarkan menjadi satu kesatuan yang memiliki keberlanjutan. Sudah saatnya bukti nyata kita lakukan agar semua kegiatan yang selama ini kurang terlihat keberlanjutannya bisa dilaksanakan dan terwujud menjadi nyata.

Konsep DMBU kedepannya diarahkan sebagai program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat bersama universitas dan lembaga kemahasiswaan. Tak lain tujuannya adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memuat nilai pengabdian, penelitian dan pendidikan. Mengabdikan di desa binaan, meneliti sebab dan asal muasal tidak terlaksananya suatu peraturan/ hukum yang ada di

masyarakat, serta mendidik secara langsung dalam kesadaran hukum (*legal awareness*).

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arumingtyas, Dyah. "Model Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Berdasarkan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Kota Semarang". *Unnes Law Journal* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15294/ulj.v3i2.4537>.
- Badan Pusat Statistik, "Jumlah perguruan tinggi di Indonesia" 16 Maret 2018, <https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementrian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html>
- Cipto, Hendra., "Setiap Tahun, Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar", 16 Maret 2018,
- Damayanti, Ratih. "Actualization of Social Welfare Through Law Number 4 of 2016 Regarding Public Housing Savings (TAPERA)". *Law Research Review Quarterly* 2, no. 3 (2016): 359-368. <https://doi.org/10.15294/snh.v2i01.21319>.
- Ditjenpdt Kemendesa, "26 Persen Desa Di Indonesia Masuk Kategori Tertinggal", <http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/161019/228-26-persen-desa-di-indonesia-masuk-kategori-tertinggal>
- Ekaningsih, Lailasari. "Perlindungan Hukum dan Sosial Terhadap Pedagang Kaki Lima Jalan Menteri Soepeno Kota Semarang Pasca Relokasi". *Unnes Law Journal* 1, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.15294/ulj.v3i2.4543>.
- Ishatono, Ishatono, and Santoso Tri Raharjo. "Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan." *Share: Social Work Journal* 6, no. 2 (2016)
- Kusnardi, Moh. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Depok: Pusat Studi HTN FH UI, 1983).
- Medistiara, Yulida., "ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa", <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Bandung: Alfabeta, 2005).
- <https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>.

ADAGIUM HUKUM

LAW IS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING

Hukum merupakan alat
untuk merekayasa
sosial/masyarakat

Roscoe Pound